



KR-Antara/Harviyan Perdana Putra

EKSPOR KE AFRIKA: Sejumlah pekerja memproduksi batik di sebuah industri batik di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (7/8). Ekspor batik pada industri tersebut mengalami penurunan sekitar 50 persen saat pandemi Covid-19 dengan 70 persen produksi batik dari total keseluruhan diekspor ke Afrika dan Dubai, UEA.

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

JAKARTA (KR) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga mengatakan, penahanan terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat.

"Kami akan pindahkan Djoko Tjandra untuk menjalani pidananya di Lapas Salemba sebagai warga binaan," ujar Reynhard di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/8). Sebelumnya, Djoko dititipkan sementara di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Bareskrim Polri untuk kepentingan pemeriksaan.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pemeriksaan terhadap Djoko Tjandra untuk saat ini sudah dirasa cukup. "Pemeriksaan Djoko Tjandra untuk sementara kami rasa sudah cukup. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan Dirjenpas untuk penempatan Djoko Tjandra selanjutnya," ucap Listyo.

Listyo juga menyampaikan bahwa gelar perkara kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi terkait pengurusan penghapusan *red notice* atas nama Djoko Tjandra akan

diadakan pekan depan. "Minggu depan kami akan melaksanakan gelar dalam rangka penetapan tersangka untuk kasus tipikor dengan mengundang rekan-rekan dari KPK," ucap Listyo. Diketahui, kasus dugaan korupsi tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan pada Kamis (6/8).

Sementara itu Komisi Kejaksaan (Komjak) tetap akan mengirimkan rekomendasi laporan terkait kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada Presiden Joko Widodo, meski Kejaksaan Agung hingga kini belum mengirimkan tembusan laporan hasil pemeriksaan (LHP) jaksa tersebut.

Ketua Komjak Barita Simanjuntak mengatakan, Perpres No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI telah amanatkan Komjak untuk melaporkan rekomendasi kepada Presiden. "Yang perlu diingat laporan Komisi Kejaksaan tak akan bisa dihambat oleh siapa pun karena langsung kepada Presiden," kata Barita.

Barita mengatakan, sebenarnya Komjak membutuhkan LHP tersebut untuk memastikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan terhadap Jaksa Pinangki.

(Ant/Ful)-d

DANA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL RP 27 TRILIUN

Rp 10 Triliun untuk Pinjaman Daerah

JAKARTA (KR) - Dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah menyediakan dana Rp 27 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 10 triliun untuk pinjaman daerah. Sedangkan dana pinjaman yang disediakan PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (SMI) mencapai Rp 5 triliun.

"Pemerintah mengalokasikan Rp 27 triliun untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana Rp 10 triliun di antaranya dialokasikan untuk pinjaman daerah," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto pada acara media briefing secara virtual di Jakarta, Jumat (7/8).

Menurut Prima, payung hukum dari pinjaman ke Pemda ini ketentuan terbaru tertuang dalam Per-

aturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2020 tentang perubahan PP No 23 Tahun 2020. Untuk mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Pusat melalui PT SMI, Pemda perlu mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

Menurut Prima, daerah yang bisa mengajukan pinjaman ini antara lain, merupakan daerah terdampak pandemi Covid-19. Daerah tersebut harus memiliki pro-

gram dan atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung PEN. Jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya. Harus memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5 persen.

"Diharapkan, dengan adanya pinjaman ini, daerah bisa mendapatkan kemampuan tambahan untuk berbelanja. Ini seperti napas kedua bagi Pemda yang terdampak. Tidak ada batas usulan karena kebutuhan tiap daerah berbeda, tapi kan tidak semua usulan bisa diterima, harus memenuhi syarat di atas," kata Prima.

Menurut Prima, pinjaman yang

disalurkan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah (Pemda) ini dapat diberikan dalam bentuk pinjaman program ataupun pinjaman kegiatan. Suku bunga pinjaman tersebut ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dikatakan, yang sudah memanfaatkan pinjaman daerah ini baru Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan NTT yang dilaksanakan oleh PT SMI.

"Sampai saat ini baru lima daerah yang mengajukan pinjaman daerah ini, kita menunggu Pemda lain untuk mengajukannya," kata Prima.

Sebelumnya, Pemerintah telah memberikan pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat masing-masing senilai Rp 12,5 triliun dan Rp 4 triliun.

(Lmg)-d

Dicabut, Keppres Pemberhentian Anggota KPU Evi Novida

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo akan menca- but Keputusan Presiden Nomor 34/P/2020 tentang pemberhentian secara tidak hormat Anggota KPU periode 2017-2022 Evi Novida Ginting. "Presiden menghargai dan menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan memutuskan untuk tidak banding. Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai Anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, di Jakarta, Jumat (7/8).

Menurut Dini Purwono, pertimbangan Jokowi untuk mencabut Keppres itu dilandasi pada sifat Keppres yang administratif. "Keppres semata-mata hanya untuk memformalkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keppres Nomor 34/P/2020 soal pemberhentian Evi Novida diterbitkan berdasarkan putusan DKPP dan karenanya substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan di Keppres," katanya.

Jokowi, menurut Dini, juga mempertimbangkan bahwa PTUN sudah memeriksa substansi perkara termasuk putusan DKPP terhadap Novida dan memutuskan untuk membatalkan pemberhentian itu. Mengingat sifat Keppres adalah administratif, maka Presiden tidak melihat alasan untuk tidak menerima putusan PTUN, substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP.

(Ant)-d

KASUS POSITIF BERTAMBAH 19 ORANG

Pasien Covid-19 Sembuh di DIY Meningkat

YOGYA (KR) - Tren kasus sembuh dari Covid-19 mengalami peningkatan dalam kurun waktu pekan ini seiring masih tingginya penambahan kasus positif di DIY. Jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 28 kasus dengan demikian total kasus sembuh menjadi sebanyak 525 kasus di DIY. Sebaliknya, kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 pun mengalami tambahan cukup signifikan sebanyak 19 kasus sehingga total kasus positif di DIY menjadi sebanyak 838 kasus.

Hal tersebut dari laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY pada Jumat (7/8). "Mayoritas kasus sembuh tersebut berasal dari Bantul sebanyak 14 orang, disusul Sleman sebanyak 8 orang kemudian Kota Yogyakarta dan Gunungkidul masing-masing sebanyak 3 orang," ujar Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk penanganan virus Korona Berty Murtiningsih.

Berty mengatakan kasus sembuh ini masih dilakukan pemeriksaan dua kali negatif untuk pasien di RS Rujukan, sementara di RS Lapangan

sebagian sudah menggunakan negatif satu kali test. Hal tersebut berpedoman dari aturan pencegahan pengendalian Covid-19 revisi 5 Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Dalam pedoman revisi 5 tersebut, memberikan keleluasaan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) untuk melakukan evaluasi perkembangan pasien selama perawatan dengan tetap mempertimbangkan risiko epidemiologi," imbuh Juru Bicara Penanganan Covid-19 Bantul Sri Wahyu Joko Santosa.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY ini menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium dan terkonfirmasi positif Covid-19 terdapat tambahan 19 kasus positif yaitu kasus 825 sampai dengan kasus 843. Tambahan kasus positif Covid-19 tersebut sebagian besar berdomisili di Bantul sebanyak 9 kasus, diikuti Sleman sebanyak 5 kasus, Kota Yogyakarta dan Gunungkidul masing-masing dua kasus serta Kulonprogo satu kasus.

"Riwayat awal penularan kasus positif tersebut mayoritas dari kontak tracing kasus positif dan perja-

lanan luar daerah yang masing-masing 6 kasus. Selanjutnya hasil skrining pasien sebanyak satu kasus dan enam kasus masih dalam penelusuran," tandas Berty.

Sementara itu di Kota Magelang, jumlah warga yang terinfeksi Covid-19 bertambah lagi, yaitu sebanyak 3 orang. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr Majid Rohmawanto mengatakan, ketiga orang tersebut berasal dari wilayah Kecamatan Magelang Utara. Dengan bertambahnya 3 orang ini, hingga Jumat malam kemarin jumlah kumulatif pasien positif tercatat 67 orang, beberapa orang diantaranya menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Kota Magelang.

Salah satu dari ketiga warga tersebut sebelumnya mengikuti kegiatan gowes ke daerah lain. Saat pulang, laki-laki berusia 56 tahun tersebut merasakan tidak enak badan. Hingga Jumat kemarin dirawat di RSJ Prof dr Soeroyo Kota Magelang. Sedang 2 orang lainnya baru pulang dari Jakarta, yaitu seorang laki-laki usia 53 tahun dan seorang perempuan usia 24 tahun. (Ira/Ria/Tha)-f

JADI SEKRETARIS UTAMA BKKBN

Tavip Siap Kampanye Kependudukan

YOGYA (KR) - Kepala Dinas Perhubungan (Dis- hub) DIY Drs Tavip Agus Rayanto MSi diangkat sebagai Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang rencananya dilantik di Jakarta, Senin (11/8) menda- tang.

Tavip menyatakan siap mendukung terobosan mengkampanyekan sejumlah program kependudukan melalui kalangan milenial dengan sentuhan futuristik dan inspiratif, dalam mengemban amanah sebagai Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BKKBN tersebut.

"Seuai pesan *Ngarsa Dalem* (Gubernur DIY Sultan HB X) ketika saya berpacu, bahwasannya jabatan baru itu merupakan amanah sekaligus janji yang harus diemban. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang besar dari institusi Pemda DIY, saya diingatkan beliau untuk tetap menjaga integritas dan terus membawa semangat perubahan," ujar Tavip kepada KR di Yogyakarta, Jumat



KR-Fira Nurfitriani

Tavip Agus Rayanto

(7/8). Tavip menyampaikan, tantangan mengelola institusi di Pemerintah Pusat tentunya jauh berbeda dengan kondisi di daerah, sehingga perlu beberapa terobosan. Diharapkan ketugasan ini dapat dilakukan dengan baik serta terus memberikan inspirasi bagi masa depan.

"Adapun untuk pengembangan institusi BKKBN ke depan, saya rasa terobosan yang sudah dilakukan Bapak Kepala BKKBN sekarang sudah tepat, terutama dalam mengkampanyekan sejumlah program kependudukan melalui kalangan milenial dengan sentuhan futuristik sekaligus inspiratif," kata mantan Asekda Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY yang juga mantan Kepala Bappeda DIY tersebut.

Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM mengucapkan selamat dan mendoakan semoga dapat menjalankan amanah baru dengan baik. Sedangkan Plt Kepala Dishub DIY nanti akan dilakukan oleh Gubernur DIY setelah Tavip dilantik. (Ira/Ria)-d

Indonesia Tak Larang TikTok

JAKARTA (KR) - Indonesia tidak akan ikut melarang penggunaan aplikasi media sosial TikTok, menyusul kebijakan beberapa negara yang menutup akses terhadap perusahaan teknologi asal China itu dengan alasan keamanan dunia maya (*cyber security*).

"Indonesia mengikuti secara seksama berbagai kebijakan negara lain terkait penutupan aplikasi TikTok dengan alasan keamanan. Namun, Indonesia tidak akan serta merta melakukan tindakan serupa hanya karena negara-negara lain melakukan," ujar Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas dalam pengarahannya secara daring dari Jakarta, Jumat (7/8).

Menurut Grata, Pemerintah akan mendorong penyelenggara sistem elektronik dan aplikasi sosial media yang beroperasi di Indonesia untuk mentaati dan mengikuti peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia.

Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan dan meminta komitmen kerja sama penyelenggaraan aplikasi sosial media dalam hal keamanan konten dan penggunaan data di Indonesia.

"Secara umum, selama tidak terbukti adanya pelanggaran hukum perundang-undangan yang berlaku, aplikasi sosial media dapat beroperasi di Indonesia," kata Grata. (Ati/Ant)-f



KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah

PASARKAN SECARA DARING: Perajin membuat ukulele di rumah produksi di Banguntapan, Bantul, Jumat (7/8). Kerajinan alat musik ukulele dengan bahan kayu mangga, akasia, dan mahoni tersebut dipasarkan secara digital dan dijual Rp 850.000-Rp 8 juta.

Hari Ini, Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka Lagi

JAKARTA (KR) - Pemerintah segera membuka pendaftaran gelombang IV program kartu prakerja mulai Sabtu (8/8) pukul 12.00 WIB. Jumlah kuota penerima kartu prakerja juga ditingkatkan jadi 800.000 orang. Program kartu prakerja yang semula hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta daya saing angkatan kerja, kini juga digunakan untuk pengembangan kewirausahaan.

Langkah ini diambil usai Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja.

"Terdapat sejumlah perubahan dalam Permenko 11/2020 ini. Program kartu prakerja yang semula hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta daya saing angkatan kerja, kini juga digunakan untuk pengembangan kewirausahaan," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono, selaku Sekretaris Komite Cipta Kerja, di Jakarta, Jumat (7/8). (Lmg)-f